

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui bersama, bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1) penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dilepaspisahkan satu tahap dengan tahap yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

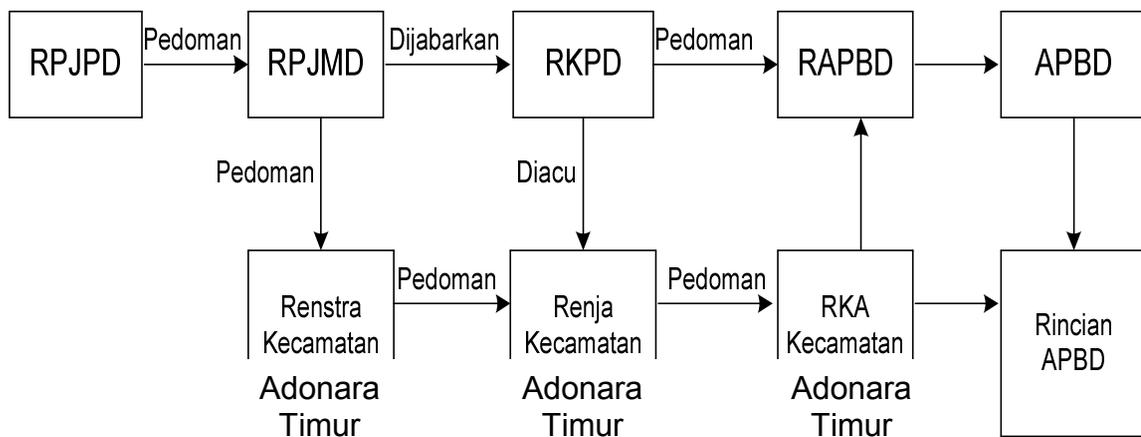
Rencana Strategis (Renstra) OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula

memperhatikan evaluasi kinerja OPD terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Adonara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017 – 2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 (PERDA Nomor 1 Tahun 2012). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang perencanaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Adonara Timur merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhatikan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik **sumberdaya manusia** maupun **sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan** yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan .



Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Adonara Timur Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Adonara Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11) , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Adonara Timur adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Adonara Timur selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
 - Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Adonara Timur adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang **pelayanan publik** dan penyelenggaraan tugas **umum pemerintahan, pelayanan masyarakat** dan **kewenangan pemerintahan** yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;
 2. Sebagai **landasan operasional** untuk menggerakkan seluruh **sumber daya Kecamatan**, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Adonara Timur yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
- 1.4. **Sistematika Penulisan**
- Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Adonara adalah sebagai berikut:
- Bab1. Pendahuluan**, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan.

Bab 3. Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah; memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun berjalan.

Bab 4: Tujuan dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 .

Bab 5: Strategi dan Arah kebijakan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab 6: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Bab 7: Kinerja Pelaksana Bidang Urusan;

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

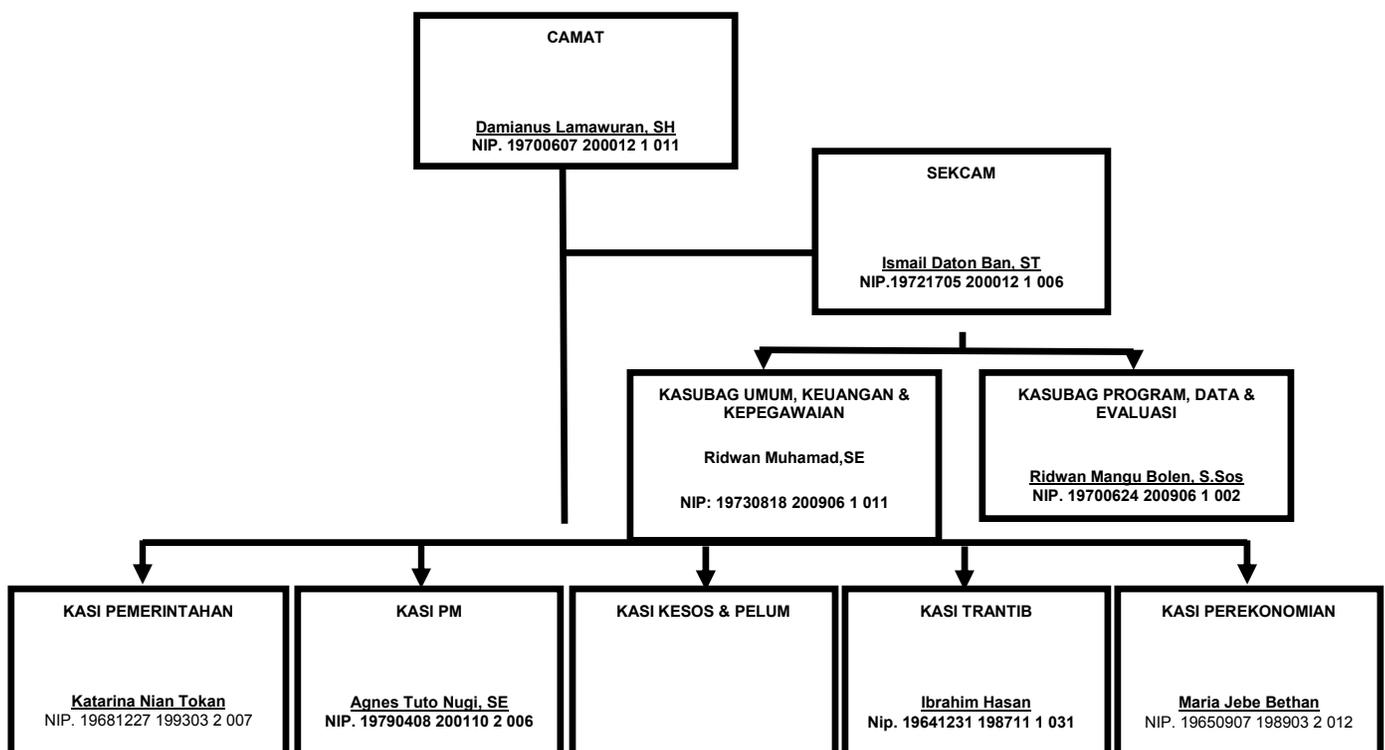
Bab 8: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR

1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Adonara Timur

Secara administrasi wilayah Tahun 2017, Kecamatan Adonara Timur terdiri dari 19 Desa dan 2 Kelurahan. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, SKPD Kecamatan Adonara Timur didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) sebagai perangkat daerah memiliki Struktur Organisasi dan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati diwilayah kecamatan. Adapun tugas dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kasi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kasi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Fungsi OPD Kecamatan Adonara Timur
- Fungsi OPD kecamatan Adonara Timur Timur adalah sebagai berikut :
1. Fungsi koordinasi. OPD Kecamatan Adonara Timur melaksanakan koordinasi dengan instansi/dinas baik yang berada di Kecamatan maupun di Kabupaten.
 2. Fungsi fasilitasi. Memfasilitasi segala kegiatan yang ada di kecamatan yang dilaksanakan instansi/dinas, UPT maupun pihak swasta

2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Adonara Timur

- a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :
Jumlah PNS Kantor Camat Adonara Timur berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1	Camat	III/a	1 Orang
2	Sekretaris Camat	III/b	1 Orang
3	Kepala Seksi	IV/a	5 Orang
4	Kasubag	IV/b	2 Orang
JUMLAH			8 Orang

Sumber : Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2017.

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina	IV/a	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	1 Orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	2 Orang
4.	Penata	III/c	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I	-	- Orang
6.	Penata Muda	III/a	4 Orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	1 Orang
8.	Pengatur	II/c	6 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1 Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
11.	Juru Tingkat I	I/ b	- Orang
12.	Juru	I/c	2 Orang
13.	Juru Muda Tingkat I	I/b	- Orang
14.	Juru Muda	I/a	- Orang
JUMLAH			21 Orang

Sumber : Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2017.

Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	- Orang
2.	Sarjana (S-1)	3 Orang
3.	Diploma IV (D-IV)	1 Orang
4.	Diploma III / Akademi / Ahli Madya	- Orang
5.	Diploma I / Diploma II	- Orang
6.	SLTA	15 Orang
7.	SLTP	2 Orang
3	SD	- Orang
JUMLAH		21 Orang

Sumber : Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2017.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	1 Orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	4 Orang
JUMLAH		5 Orang

Sumber : Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2018.

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Adonara Timur

NO	JENIS BARANG / INVENTARIS	JUMLAH
1	Gedung kantor	1 Unit
2	Rumah jabatan	1 buah
3	Mess kecamatan	2 buah
7	Aula rapat	1 buah
8	Meja kerja	22 Buah
9	Lemari	8 buah
10	Kursi kerja	22 buah
11	Meja rapat	3 buah

12	Sepeda motor	12 unit
13	Komputer	2 buah (1 Rusak)
14	Mobil	1 Unit
15	Laptop	5 buah
16	Peralatan sound system	1 set

2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Adonara Timur

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Adonara Timur terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2012 - 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase tersedianya administrasi per- kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung peningkatan SDM dan hasil kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya Anggaran yang dikelola Kantor Kecamatan Adonara Timur selama 2 tahun terakhir guna menunjang tugas pokok dan fungsi adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran dan Verifikasi Pelayanan OPD Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2015

NO	URAIAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH	3.356.220.594,48	3.356.220.594,48
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.226.017.094,48	2.226.017.094,48
	BELANJA PEGAWAI	2.226.017.094,48	2.226.017.094,48
	Gaji dan tunjangan pegawai	2.226.017.094,48	2.226.017.094,48
	Tambahan penghasilan PNS (Camat dan Sekcam)	13.200.000,00	13.200.000,00
	Tambahan penghasilan untuk peningkatan kesejahteraan PNS	124.830.000,00	124.830.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	1.130.203.500,00	1.130.203.500,00
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	644.223.500,00	644.223.500,00
1	Belanja Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	1.600.000,00	1.600.000,00
4	Belanja jasa administrasi keuangan	14.853.000,00	14.853.000,00
5	Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Belanja penyediaan jasa alat tulis kantor	60.922.000,00	60.922.000,00
7	Belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.655.000,00	38.655.000,00
8	Biaya penyediaan jasa komponen instalasi listrik, penerangan bangunan	7.428.500,00	7.428.500,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	51.950.000,00	51.950.000,00
10	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	183.027.500,00	183.027.500,00
11	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	183.027.500,00	183.027.500,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	81.560.000,00	81.560.000,00
III	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	285.792.000,00	285.792.000,00
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	54.000.000,00	54.000.000,00
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.500.000,00	59.500.000,00
14	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	149.292.000,00	149.292.000,00
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	23.000.000,00	23.000.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.660.000,00	30.660.000,00
16	Bimbingan Teknis Inplemintasi Peraturan Perundang – undangan	30.660.000,00	30.660.000,00
V	PROGAM KOORDINASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	169.528.000,00	169.528.000,00
17	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM, PM, PPK	97.400.000,00	97.400.000,00
18	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	16.800.000,00	16.800.000,00
19	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	55.328.000,00	55.328.000,00
20	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27.100.000,00	27.100.000,00

Anggaran dan Verifikasi Pelayanan OPD Kantor Camat Adonara Timur Tahun 2016

NO	URAIAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH	3.834.362.996,30	3.834.362.996,30
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.435.773.846,30	2.435.773.846,30
	BELANJA PEGAWAI	2.435.773.846,30	2.435.773.846,30
	Gaji dan tunjangan pegawai	2.435.773.846,30	2.435.773.846,30
	Tambahan penghasilan PNS (Camat dan Sekcam)	14.400.000,00	14.400.000,00
	Tambahan penghasilan untuk peningkatan kesejahteraan PNS	5.100.000,00	5.100.000,00
II	BELANJA LANGSUNG	1.398.589.150,00	1.398.589.150,00
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	805.157.150,00	805.157.150,00
1	Belanja Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00
2	Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	17.600.000,00	17.600.000,00
3	Belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	2.961.000,00	2.961.000,00
4	Belanja jasa administrasi keuangan	17.953.000,00	17.953.000,00
5	Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor	6.120.850,00	6.120.850,00
6	Belanja penyediaan jasa alat tulis kantor	51.520.675,00	51.520.675,00
7	Belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.925.000,00	37.925.000,00
8	Biaya penyediaan jasa komponen instalasi listrik, penerangan bangunan	5.391.625,00	5.391.625,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	50.700.000,00	50.700.000,00
10	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.687.500,00	195.687.500,00
11	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	195.687.500,00	195.687.500,00
12	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung dan Teknisi Perkantoran	191.960.000,00	191.960.000,00
	PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	397.682.000,00	397.682.000,00
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	41.240.000,00	41.240.000,00
14	Penadaan Perlengkapan Gedung kantor	28.642.000,00	28.642.000,00
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00
16	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	239.700.000,00	239.700.000,00
17	Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas / Operasional	44.000.000,00	44.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMER DAYA APARATUR	34.850.000,00	34.850.000,00
18	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang – undangan	34.850.000,00	34.850.000,00
	PROGAM KOORDINASI PEERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT	160.900.000,00	160.900.000,00
19	Pembinaan Adminstrasi dan Pelaporan (PAP) PNPM, PPK	90.900.000,00	90.900.000,00
20	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	23.900.000,00	23.900.000,00
21	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	46.100.000,00	46.100.000,00
22	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27.000.000,00	27.000.000,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD Kecamatan Adonara Timur

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Adonara Timur. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini maka harus dilakukan Refleksi terhadap segala sesuatu yang berada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Adonara Timur perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan) Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) (SWOT).

Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada SKPD Kantor Kecamatan Adonara Timur sebagai berikut :

A. Kekuatan

1. Jumlah Pegawai yang memadai
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif
3. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sehingga sebagai SKPD tersendiri maka memiliki sebagian Kewenangan Bupati.
4. Adanya kebijakan yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Adonara Timur.
5. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi
6. Pola kerja di Kecamatan Adonara Timur yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif
7. Suasana kerja di Kecamatan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work)

8. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Adonara Timur sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran yang cukup memadai.

B. Peluang

1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya
2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
3. Adanya Bimtek/Diklat dan Sosialisasi tentang Peraturan-Peraturan yang diadakan di Kabupaten
4. Adanya peran sektor swasta dalam pembangunan daerah
5. Pesatnya Kemajuan teknologi dan Globalisasi
6. Potensi SDA yang belum tergali
7. Adanya Program-Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat.

C. Ancaman/Tantangan

1. Kondisi geografis dan demografis (jumlah penduduk) yang besar
2. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung program – program pembangunan (orientasi Proyek)
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
4. Rendahnya kualitas & kinerja sebagian aparat pemerintah desa
5. Ada kecemburuan antara Kepala Desa dan Sekdes PNS
6. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi *agressive* artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya digali dan dikelola.

BAB III :

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan OPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Adonara Timur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Adonara Timur

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kemandirian aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung ,SOP	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat

			dan tanpa KKN		sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Kapasitas SDM dan aparaturnya masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparaturnya yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparaturnya dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparaturnya yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparaturnya medis dan paramedis sertaketrsediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatangan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber	

			Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean government menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

3.2. Telahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. Flores Sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang

terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

3. Selamatkan Tanaman Rakyat dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

Sebagai salah satu OPD, maka Kantor Camat Adonara Timur berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “ Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Reformasi Birokrasi			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik

	5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Kurang maksimalnya kelembagaan PKK dan pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana yang disediakan demi terselenggaranya kegiatan PKK

3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada RTRW - Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang - Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai perntayaan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Adonara Timur maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Adonara Timur perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan

<p>Fasilitas (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.</p> <p>5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.</p> <p>6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.</p>	<p>tuntutan capaian kinerja;</p> <p>2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.</p> <p>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</p> <p>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun).</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.</p> <p>6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran;</p> <p>7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan;</p> <p>8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;</p> <p>9. Perilaku masyarakat belum mendukung program</p> <p>10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.</p>
---	---

Peluang	Tantangan
<p>1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya.</p> <p>2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan.</p> <p>3. Adanya program utama "Gerbang Emas"</p> <p>4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab</p> <p>5. Kemajuan teknologi.</p> <p>6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya).</p> <p>7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.</p> <p>8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.</p>	<p>1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah</p> <p>2. Potensi SDA yang belum tergali.</p> <p>3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar.</p> <p>4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran</p> <p>5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik;</p> <p>6. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Adonara Timur, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.</p>

3.3.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka

isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Adonara Timur lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV :
TUJUAN DAN SASARA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bab ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Pelayanan OPD Kantor Camat Adonara Timur yang mengacu pada Visi dan Misi RPJMD.

Tabel 4.1.1 :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	
Misi 5. Reformasi Birokrasi.									
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur.	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur.	Terlaksananya kegiatan BIMTEK/ DIKLAT Peningkatan Sumber Daya Aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Meningkatkan kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tersedianya dokumen Pelaporan dan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Meningkatkan Fungsi Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat.	Terlaksananya Fungsi koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
 - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
 - 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
 - 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
 - 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 - 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
 - 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
 - 1)Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
 - 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
 - 1)Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Visi : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata			
Misi 5. Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta penyediaan fasilitas pendukung perkantoran yang memadai.	1. Peningkatan sumber daya aparatur melalui Bimtek/ Diklat. 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 3'. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas.
Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur.	Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur.	1.1. Pengalokasian Anggaran untuk penyediaan Sarana Prasarana Aparatur. 2.2. Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur baik di kecamatan maupun di desa.	Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK/ DIKLAT.
Meningkatkan kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Meningkatnya kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta penyediaan fasilitas pendukung Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	3. 1. Meningkatkan Kemampuan sumber daya aparatur melalui Bimtek/ Diklat. 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 3.
Meingkatkan Fungsi Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan.	Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pembangunan.	4. 1. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. 2. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten. 3. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Desa.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Adonara Timur

Tabel 4.2.1 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Adonara Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan pemerintahan desa yang berkualitas.								
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten	34%	55%	67%	80%	100%
2.	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparat pemerintahan desa dalam pelayanan kemasyarakatan	Adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Sumber Daya Alam yang berkualitas melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan pengkoordinasian serta pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan.								
3.	Meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Meningkatnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program – program pemberdayaan	98%	98%	98%	98%	98%
4.	Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa	Tersedianya dokumen RPJMDes dan APBDes di desa	98%	98%	98%	98%	98%
Misi 3. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.								
5.	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diakses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Adonara Timur.

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANJA DAERAH																	
	Belanja Tidak Langsung	1.976.451.800,00	2.174.343.026,00	2.079.523.681,12	2.435.773.946,30	2.270.325.352,43	1.976.451.800,00	2.174.343.026,00	2.194.837.231,00	2.396.943.373,00	2.222.460.095,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Belanja Pegawai	1.976.451.800,00	2.174.343.026,00	2.079.523.681,12	2.435.773.946,30	2.270.325.352,43	1.976.451.800,00	2.174.343.026,00	2.194.837.231,00	2.396.943.373,00	2.222.460.095,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.863.531.800,00	2.042.343.026,00	2.079.523.681,12	2.435.773.946,30	2.270.325.352,43	1.863.531.800,00	2.042.343.026,00	2.072.359.231,00	2.288.043.373,00	2.113.560.095,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tambahan Penghasilan PNS (Sekcam & Camat)	14.250.000,00	18.000.000,00	13.200.000,00	14.400.000,00	19.800.000,00	14.250.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00	28.500.000,00	36.600.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tambahan Penghasilan PNS untuk Peningkatan Kesejahteraan	98.670.000,00	114.000.000,00	91.920.000,00	92.820.000,00	96.240.000,00	98.670.000,00	114.000.000,00	93.790.000,00	80.400.000,00	72.300.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	BELANJA LANGSUNG	529.292.500,00	528.164.000,00	1.024.068.500,00	1.398.589.150,00	1.295.080.850,00	529.292.500,00	528.164.000,00	1.125.344.630,00	1.381.663.900,00	1.274.142.300,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.816.000,00	285.658.000,00	644.223.500,00	805.157.150,00	863.698.250,00	301.816.000,00	285.658.000,00	639.494.730,00	793.345.300,00	847.694.050,00	100%	100%	100%	100%	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	495.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	600.000,00	495.000,00	1.199.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi																	
2	Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	9.000.000,00	14.000.000,00	17.600.000,00	17.640.000,00	9.600.000,00	9.000.000,00	13.999.500,00	15.779.050,00	17.277.900,00	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.750.000,00	600.000,00	1.600.000,00	2.961.000,00	2.868.000,00	1.750.000,00	600.000,00	1.534.000,00	2.961.000,00	2.068.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.000.000,00	22.200.000,00	14.853.000,00	17.953.000,00	39.710.000,00	9.000.000,00	22.200.000,00	14.829.200,00	17.898.000,00	39.344.500,00	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	6.120.850,00	7.963.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	6.120.850,00	7.928.650,00	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	60.922.000,00	61.520.675,00	60.748.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	60.922.000,00	60.903.275,00	60.675.500,00	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Belanja Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan Biaya Penyediaan Komponen	22.450.000,00	27.500.000,00	38.655.000,00	55.425.000,00	28.136.250,00	22.450.000,00	27.500.000,00	38.655.000,00	51.247.000,00	27.660.400,00	100%	100%	100%	100%	100%		
8	Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.500.000,00	3.000.000,00	7.428.500,00	8.341.625,00	6.114.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.428.500,00	7.758.625,00	6.108.500,00	100%	100%	100%	100%	100%		
9	Perundang-undangan	0,00	0,00			960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.500.000,00	35.500.000,00	51.9350.000,00	50.700.000,00	40.020.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	51.950.000,00	50.060.000,00	241.550.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	134.860.000,00	110.445.000,00	193.827.500,00	195.687.500,00	189.269.500,00	134.860.000,00	110.445.000,00	256.500.000,00	234.845.000,00	162.610.600,00	100%	100%	100%	100%	100%		
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	56.556.000,00	49.418.000,00	193.827.500,00	195.687.500,00	189.269.500,00	56.556.000,00	49.418.000,00	140.169.430,00	189.462.500,00	241.550.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Penyediaan Jasa dan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	0,00	0,00	81.056.000,00	191.960.000,00	279.560.000,00	0,00	0,00	76.960.000,00	191.960.000,00	269.100.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89.919.000,00	62.500.000,00	285.792.000,00	397.682.000,00	233.586.600,00	89.919.000,00	62.500.000,00	285.672.000,00	390.568.600,00	231.752.250,00	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Pengadaan Kendaraan Dinas	18.679.000,00	0,00	54.000.000,00	41.240.000,00	43.175.000,00	18.679.000,00	0,00	53.880.000,00	41.240.000,00	42.800.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Perlengkapan																	
15	Rumah Jabatan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
16	Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor	28.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.200.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	43.500.000,00	40.150.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.100.000,00	0,00	59.500.000,00	28.642.000,00	69.755.000,00	19.100.000,00	0,00	59.500.000,00	28.592.000,00	69.459.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	18.000.000,00	50.000.000,00	149.292.000,00	239.700.000,00	26.851.000,00	18.000.000,00	50.000.000,00	149.292.000,00	239.700.000,00	26.847.750,00	100%	100%	100%	100%	100%		
19	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	6.140.000,00	12.500.000,00	23.000.000,00	44.100.000,00	24.605.600,00	6.140.000,00	12.500.000,00	23.000.000,00	37.536.600,00	23.531.500,00	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	100%	100%	100%	100%	100%		

	PROGAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	0,00	30.756.000,00	30.660.000,00	34.850.000,00	20.011.000,00	0,00	30.756.000,00	30.651.900,00	34.850.000,00	20.011.000,00						
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	30.756.000,00	30.660.000,00	34.850.000,00	20.011.000,00	0,00	30.756.000,00	30.651.900,00	34.850.000,00	20.011.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGAM KOORDINASI PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT			169.528.000,00	160.900.000,00	177.785.000,00			169.526.000,00	160.900.000,00	174.685.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan (PAP) PNPMPK	99.943.000,00	97.400.000,00	97.400.000,00	90.900.000,00	86.135.000,00	99.943.000,00	97.400.000,00	97.398.000,00	90.900.000,00	86.135.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	10.559.000,00	22.200.000,00	16.800.000,00	23.900.000,00	37.900.000,00	10.559.000,00	22.200.000,00	16.800.000,00	23.900.000,00	37.900.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	55.328.000,00	46.100.000,00	33.100.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	55.328.000,00	46.100.000,00	30.000.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Pekan Panutan Pembayaran PBB	9.055.000,00	11.650.000,00					11.650.000,00	0,00	0,00	0,00						

BAB. VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Kantor Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Adonara Timur dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Adonara Timur Tahun 2017 – 2022 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Adonara Timur. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Adonara Timur telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Renstra Kantor Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat bagi kebutuhan perencanaan pembangunan di daerah demi terwujudnya tujuan Masyarakat Yang Adil, Maju, Mandiri dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Waiwerang, Oktober 2017
Camat Adonara Timur

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197509101994121001

